

EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) PADA LPSE KOTA PEKANBARU

Oleh :

Utari Swadesi

Email : Utariswadesi05@gmail.com

Pembimbing : **Abdul Sadad, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research is based on the phenomenon is still often the occurrence of corruption, collusion and nepotism (KKN) practices of goods and services by the government. So that e-procurement can be an instrument to prevent and reduce corruption, collusion and nepotism (KKN) because through e-procurement program, procurement of goods and services can further improve transparency and accountability, increase market access and fair business competition, Improve the efficiency of the procurement process, support monitoring and auditing processes, and meet real-time information access needs. So the purpose of this study is to know the effectiveness of procurement of goods and services electronically (e-procurement) on LPSE Pekanbaru and to determine the factors that affect the effectiveness of procurement of goods and services electronically (e-procurement) on LPSE Pekanbaru.

The concept of theory used is effectiveness, which Mahmudi proposes. This research uses qualitative research methods with descriptive data assessment. In the data collecting researchers using interviewing techniques, observation and documentation. By using key informant as source of information and technique of triangulation as source in testing of data validity.

The results of this study by using e-procurement program in the procurement of goods and services within Pekanbaru city government has not been implemented effectively. Because this is due to limited human resources (HR), technical difficulties and limited funding. Which all these factors greatly affect the effectiveness of procurement of goods and services electronically (e-procurement) on LPSE Pekanbaru.

Keywords: Effectiveness, E-Procurement, LPSE

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah adalah sebuah bentuk pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersistem. Organisasi publik dalam hal ini birokrasi pemerintahan sebagai *stakeholders* seharusnya memiliki rasa kepekaan terhadap kepentingan dan permasalahan masyarakat yang harus dipecahkan. Birokrasi juga dituntut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya dan tidak melaksanakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan melampaui batas kewenangannya. Dengan ini akan tercipta bentuk pelayanan publik yang efisien dan efektif, transparan, akuntabel serta akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.

Untuk menciptakan layanan publik yang berkualitas dengan biaya rendah, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yang merupakan payung hukum dari seluruh kebijakan detail teknis di bidang *e-government*. Olehnya itu dalam mendukung terselenggaranya *good governance*, maka kini di setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi layanan *e-procurement*.

Fraud merupakan tindakan kecurangan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok yang melanggar hukum. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau kewenangan terhadap aset baik perusahaan ataupun negara. Kasus *fraud* dapat terjadi pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa sangat dibutuhkan oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD dalam mendukung kegiatan operasional.

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan instansi pemerintah dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) serta yang tanpa menggunakan dana APBN memerlukan pedoman pengaturan sendiri yang diatur oleh direksi berdasarkan pedoman umum pelaksanaan barang dan jasa yang telah ditetapkan menteri BUMN.

Proses pengadaan barang dan jasa sebelum tahun 2010 masih dilakukan secara konvensional, yaitu pertemuan langsung antara pihak yang terkait dalam pengadaan seperti penyedia pengadaan barang atau jasa dan panitia pengadaan barang atau jasa. Pertemuan langsung dengan pihak penyedia barang/jasa dinilai memiliki kelemahan, yaitu masih adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berkembang sehingga merugikan negara. Selain itu waktu yang lama dinilai dapat menyia-nyiaakan waktu dan biaya, serta kurangnya persaingan antar pemasok yang disebabkan oleh pemberian hak tertentu oleh panitia pengadaan.

Dari berbagai fenomena di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat permasalahan pengadaan barang/jasa dalam bentuk *fraud* yang disebabkan oleh sistem pengadaan yang belum dapat digunakan dengan optimal, kurangnya penegakan kebijakan/peraturan yang ditetapkan pemerintah, dan kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan *e-Procurement*, serta masih adanya penyalahgunaan wewenang oleh tim pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah. Selain itu kurang adanya sinergi dengan penggunaan *e-Audit*.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu : **EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) PADA LPSE KOTA PEKANBARU**

Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada LPSE Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada LPSE Kota Pekanbaru?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada LPSE Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada LPSE Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan mendapat penemuan baru guna memperkaya khasanah keilmuan di bidang administrasi negara
 2. Sebagai bahan kajian teoritis dalam upaya efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada LPSE Kota Pekanbaru

- a. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi atau sebagai bahan evaluasi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada LPSE Kota Pekanbaru.
2. Bagi penulis, sebagai upaya pemahaman dan pengembangan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan
3. Selanjutnya sumbangan pemikiran untuk mengatasi masalah yang sama atau terkait di masa yang akan datang.

KONSEP TEORI

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan ,daya guna, adanya kesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Sadad (2014:41) mengatakan bahwa konsep efektivitas merupakan konsep yang luas mencakup berbagai faktor dan dari sudut pandang mana kita melihatnya. Pada umumnya efektivitas dihubungkan dengan berbagai cara pencapaian tujuan baik dari segi proses ataupun dari segi waktu.

Wiludjeng (2007:4) mengatakan efektif adalah kemampuan untuk menetapkan tujuan yang tepat atau kemampuan melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Efektif dapat dinilai dari pemenuhan atau realisasi tujuan atau dari *output* suatu tugas. Sedangkan **Danim (2004:117)** beranggapan bahwa efektif merujuk pada hasil guna dan efisien merujuk pada hasil kerja.

Badrudin (2014:21) mengatakan efektif adalah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar. Efektivitas banyak berkaitan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya, semakin efektif organisasi tersebut.

Winardi (2004:81) beranggapan efektivitas adalah hubungan suatu organisasi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut **Ammirullah dan Budiyo (2004:9)** efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil-akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya.

Solihin (2009:4) mengatakan bahwa efektivitas menunjukkan tercapainya tujuan yang diinginkan melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. **Handoko (2007:7)** berpendapat bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang *manajer efektif* dalam memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metoda (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.

Winardi (2003:45) beranggapan bahwa efektivitas diperbaiki dengan jalan mencapai sumber-sumber daya yang tepat, dan pengorganisasian manajemen dan para karyawan untuk bekerja sama guna mencapai sasaran-sasaran keorganisasian. Efektivitas keorganisasian dapat dianggap sebagai alat pengukur kualitas

hubungan sebuah organisasi dengan lingkungannya. Secara paradoks dapat dikatakan bahwa sebuah organisasi mungkin efektif (suatu hubungan langgeng dengan lingkungannya) tetapi tidak efisien (secara internal ia penuh pemborosan).

Menurut **Mahmudi (2005:92)** dalam bukunya manajemen kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (*sumbangan*) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. *Output* merupakan segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*intangibel*) dan *outcome* merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang ditemukan (Sugiyono, 2006:110) Penelitian ini memusatkan pada permasalahan-permasalahan yang

ada pada saat penelitian dilakukan (pada saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual. Maka memecahkan masalah yang ada dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan data status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Pekanbaru, fokus penelitian ini adalah pada Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada LPSE Kota Pekanbaru. Hal ini berdasarkan pertimbangan karena Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada LPSE Kota Pekanbaru perlu diidentifikasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah di Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Kota Pekanbaru.

3. Informan Penelitian

Sugiyono (2013:97), Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik bola salju (*snowball sampling*). *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Strategi dasar teknik bola salju dimaksud dengan menetapkan satu atau beberapa orang informan kunci (*key informan*) dan melakukan interview dengan menetapkan satu atau beberapa orang diminta arahan, saran, petunjuk siapa baiknya yang menjadi informan berikutnya yang menuntut mereka memiliki pengetahuan, pengalaman informasi yang dicari, selanjutnya penentuan informan berikutnya. Begitu

seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua LPSE Kota Pekanbaru. Selanjutnya informan penelitian ini adalah Staf Pendukung Adm. Sistem Informasi, Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Kontraktor dan Masyarakat.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data seakurat dan seobyektif mungkin, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada di lapangan. Baik melalui observasi maupun wawancara.

Data primer ini diperoleh dari :

1. Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada LPSE Kota Pekanbaru.
2. Melalui observasi lapangan yang dilakukan di Kota Pekanbaru

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer secara langsung yang diperoleh dari hasil buku bacaan, majalah, dokumen-dokumen, serta bahan tertulis sejenis lainnya dari instansi terkait seperti Perpres No 54/2010 Perka LKPP No 2 tahun 2010, Info lelang dan Pemenang

lelang, maupun instansi lain yang terkait dengan objek penelitian. Data yang berjenis kualitatif dapat berupa teks, gambar dan suara.

Dalam penelitian ini yang termasuk data sekunder ialah :

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru
2. Letak Geografis Kota Pekanbaru
3. Letak Geografis Kantor LPSE Pekanbaru
4. Informasi lelang

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu peneliti dalam teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Terkait dengan masalah penelitian, teknik pengumpulan data diperoleh teknik wawancara tidak terstruktur, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam obyek penelitian.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung oleh penulis dilapangan atau lokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengamati fenomena sosial dan gejala yang ada di lokasi penelitian, untuk mendukung keabsahan data dari apa yang telah dan akan di observasi.

c. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa aturan lembaga, foto,

dokumen lembaga, buku-buku maupun penelitian terdahulu, buletin atau berita-berita yang disiarkan ke media massa yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan situasi sosial yang diteliti.

2. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Selama tahap analisa data, data disusun secara kategoris dan kronologis serta ditinjau secara berulang-ulang. Dengan cara ini diharapkan pengkajian masalah dapat berlangsung secara terperinci dalam bentuk tulisan atau tanpa menggunakan teknik perhitungan statistik. Untuk lebih meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data penelitian ini, penulis melakukan teknik triangulasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada Ipse Kota Pekanbaru

1. Input

Harapan dari penerapan *e-procurement* ini adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam proses

pengadaan. Hal ini akan tercapai apabila proses pengadaan barang/jasa berlangsung secara transparan dan diikuti oleh sejumlah peserta pengadaan yang cukup banyak serta mengedepankan proses persaingan yang sehat. *E-procurement* akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi belanja daerah segera dapat diwujudkan.

Sistem *e-Procurement* merupakan solusi dan alat bagi instansi pemerintah /BUMN/BUMD untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang atau jasa. Dalam pelaksanaannya proses pengadaan barang dan jasa *e-Procurement* menggunakan internet atau secara *online*, dan diharapkan dengan sistem tersebut *fraud/praktik* kecurangan dalam lelang pengadaan barang dan jasa dapat diminimalisir. Yang menjadi input dalam penelitian ini adalah diawali dengan adanya : a. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah; b. Perka LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang layanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik.

a. Perpres No. 54 Tahun 2010

Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki komitmen terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal ini dibuktikan dengan di bentuknya Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Pekanbaru.

Berikut kutipan wawancara :
“*dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik ini bertujuan agar pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan adil dan layak bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat*”.
(Wawancara dengan ketua LPSE Kota Pekanbaru, 8 Mei 2017)

Teknologi informasi jika dimanfaatkan dengan baik oleh birokrasi pemerintah akan dapat mengurangi angka kebocoran anggaran dalam pembangunan dan ini akan dapat memperbaiki pelaksanaan program pemerintah yang selama ini kurang efektif sehingga ini akan membantu tercapainya kinerja birokrasi/instansi pemerintah yang transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel.

b. Perka LKPP No. 2 Tahun 2010

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah pasal 111 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan

teknis operasionalnya diatur oleh peraturan kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang layanan pengadaan secara elektronik.

Berikut kutipan wawancara :
“Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah e-tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang tata cara E-tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas catalog elektronik (e-catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (e-audit), dan tata cara pembelian barang (e-purchasing)”. (Wawancara dengan ketua LPSE Kota Pekanbaru, 8 Mei 2017)

Jadi Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) mengatur standar operasional prosedur dan proses atau tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) pada LPSE Kota Pekanbaru

Adapun dalam penelitian ini juga terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik e-

procurement pada LPSE Kota Pekanbaru. Efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini sudah dibilang efektif. Dalam hal ini penulis akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik *e-procurement* pada LPSE Kota Pekanbaru. Adapun faktor-faktor dalam penelitian ini mengacu pada tiga aspek yaitu Sumber Daya Manusia, Kesulitan Teknis, dan Sumber Pendanaan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi yang ingin mencapai suatu efektivitas pelaksanaan program. Sumber daya manusia adalah faktor internal dalam proses pengadaan barang dan jasa di LPSE Kota Pekanbaru, jumlah sumber daya manusia sangat mempengaruhi terhadap proses pengadaan barang dan jasa.

Berikut kutipan wawancara mengenai sumber daya manusia :

“latar belakang panitia tidak satu bidang saja ada beberapa bidang dan untuk menjadikan seorang panitia focus terhadap pengadaan barang dan jasa ini memang harus banyak membutuhkan pelatihan-pelatihan dan simulasi-simulasi pekerjaan paket pengadaan barang dan jasa ini, itulah salah satu hambatannya. Dan dari jumlah panitianya sampai saat ini kita itu jumlah panitia dengan paket itu tidak seimbang jadi banyak pekerjaan paket-paket ini

agak terlambat proses penyelesaiannya, karena panitia membutuhkan waktu dan focus terhadap penyelesaian satu paket itu”.(Wawancara dengan pokja ULP, 15 Mei 2017)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang tersedia saat ini di pengadaan barang dan jasa LPSE Kota Pekanbaru masih belum seimbang dengan jumlah paket pengadaan yang ada sehingga pekerjaan paket agak terlambat proses penyelesaiannya, dan panitia pengadaan barang dan jasa sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan dan simulasi-simulasi pekerjaan paket pengadaan barang dan jasa agar focus terhadap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

2. Kesulitan Teknis

Kesulitan teknis memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan. Kesulitan teknis tersebut antara lain sarana-prasarana dan *intern* organisasi. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, LPSE Kota Pekanbaru memiliki kondisi *inter* organisasi yang kondusif. Masing-masing panitia mampu menyelesaikan aspek pekerjaan yang menjadi tanggungjawab dengan baik. Telah terbentuk komunikasi yang baik serta sikap profesionalitas dari para panitia yang bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan kondisi tersebut, tidak ditemukan lagi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaannya sehingga tidak

terjadi *turnover*. Dalam aspek sarana prasarana yang tersedia, terdapat masalah yaitu kendala terkait koneksifitas internet yang tersedia. *Bandwidth* yang telah tersedia masih sangat terbatas sehingga memerlukan jaringan internet yang lebih baik demi menopong pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Masalah konektivitas sangat berpengaruh pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, karena proses pengadaan dari *e-procurement* menggunakan fitur *online*. Pendaftaran, pengelolaan data sampai pengumumannya dilakukan melalui media internet. Contohnya pada saat melakukan *upload* atau *download* data yang berisikan file pengadaan.

Berikut kutipan wawancara mengenai faktor kesulitan teknis :

“memang sampai saat ini untuk masalah konektivitas terkadang masih terjadi, dan gangguan jaringan itu sendiri sebenarnya langsung dari pusat yang terkadang menjadi kendala yaitu susah login, karena ya maklum saja namanya kan kita tergantung pada jaringan internet jadi ya masih wajar-wajar saja, dan untuk gangguan jaringannya juga tidak memakan waktu yang lama cuman sekitar satu sampai dua jam biasanya”. (Wawancara dengan Ketua LPSE Kota Pekanbaru, 8 Mei 2017)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk kesulitan secara teknis masih

bisa diatasi secara maksimal, dan untuk masing-masing panitianya juga sudah ahli pada bidang masing-masing yang mereka kerjakan sehingga jika terjadi kendala panitia sudah bisa mengatasinya.

3. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghimpun dana digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa dari APBD. Sumber pendanaan yang memadai untuk mengoperasionalkan layanan LPSE yang berbasis komputerisasi dan internet. Untuk mengetahui dukungan pendanaan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di LPSE Kota Pekanbaru.

Berikut kutipan wawancara mengenai sumber pendanaan :

“disini untuk penerapan e-procurement harus diakui memang memerlukan biaya yang cukup besar, seperti : pembangunan infrastruktur kelengkapan alat, server, data center dan security. Selain itu biaya pemeliharaan jaringan juga perlu dukungan pendanaan yang memadai”.
(Wawancara dengan Ketua LPSE, 8 Mei 2017)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, menunjukkan bahwa untuk membangun LPSE tidak membutuhkan dana yang sedikit. System komputerisasi dan layanan internet memang sangat memerlukan biaya yang cukup besar untuk mengoperasionalnya. Untuk

menunjang kelancaran akses layanan LPSE tersebut, maka pemprov sudah mengalokasikan dana melalui APBD untuk pengadaan computer dan jaringan, pemeliharaan serta pembayaran gaji untuk petugas LPSE. Disatu sisi system LPSE diakui telah memberikan efisiensi baik bagi pengguna jasa maupun penyedia jasa. Hanya saja untuk menciptakan *e-procurement* melalui layanan LPSE diperlukan biaya yang cukup besar. Dalam hal ini pemrov harus mempersiapkan anggaran untuk menjamin kualitas jaringan dan keamanan internet di LPSE Kota Pekanbaru.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektifitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik *e-procurement* pada LPSE Kota Pekanbaru memberikan hasil positif terhadap perwujudan proses pengadaan barang/jasa yang sehat. Hal tersebut dapat dilihat dari terwujudnya sistem yang akuntabilitas dalam pelaksanaan barang dan jasa di LPSE Kota Pekanbaru. Hal yang perlu diperhatikan adalah koordinasi dari masing-masing SKPD agar *e-procurement* yang dilaksanakan dapat lebih optimal. LPSE Kota Pekanbaru senantiasa melakukan berbagai upaya agar perwujudan *e-procurement* sebagai proses pengadaan barang dan jasa yang baik dapat terlaksana. Pada prinsip efisiensi dan efektifitas, telah terlaksana sesuai dengan tujuan *e-procurement*. Tujuan *e-*

procurement antara lain meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dengan pemanfaatan teknologi informasi modern, terciptanya optimalisasi anggaran dan waktu dalam proses pengadaan yang dilakukan sehingga terwujudlah proses pengadaan barang dan jasa yang efektif.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik *e-procurement* pada LPSE Kota Pekanbaru antara lain adanya Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Kesulitan Teknis, dan Faktor Sumber Pendanaan. Dari beberapa faktor tersebut, ada yang menjadi masalah dalam pelaksanaan *e-procurement* yang dilaksanakan, seperti faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tersedia pada LPSE Kota Pekanbaru saat ini belum seimbang dengan jumlah paket pengadaan yang ada. Kesulitan teknis tersebut antara lain sarana-prasarana dan kondisi *intern* organisasi yang kondusif. Masing-masing panitia mampu menyelesaikan aspek pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Untuk faktor sumber pendanaan, dana yang dihimpun disini adalah dana dari APBD yang memadai untuk mengoperasikan layanan LPSE yang berbasis komputerisasi dan internet. Untuk mengetahui dukungan pendanaan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di LPSE Kota Pekanbaru. Hanya saja untuk menciptakan *e-procurement*

melalui layanan LPSE diperlukan biaya yang cukup besar. Dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru harus mempersiapkan anggaran untuk menjamin kualitas jaringan dan keamanan internet di LPSE Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui LPSE Kota Pekanbaru, perlu didukung oleh semua pihak termasuk para Pimpinan Daerah. Komitmen itu juga dapat dilakukan dengan melakukan kontrol langsung terhadap proses lelang secara elektronik termasuk mau menerima informasi dari masyarakat untuk ditindaklanjuti, manakala masih ditemukan prosedur yang janggal dalam proses lelang. Dan juga diperlukannya berbagai macam bentuk pelatihan bagi para implementator, rekanan juga masyarakat agar memiliki kualifikasi yang baik dibidang teknologi informasi. Serta diperlukan proses sosialisasi yang merata bagi para implementator, rekanan juga masyarakat. Dengan pemerataan tersebut kemudian diharapkan *e-procurement* yang dilaksanakan di LPSE Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan efektif.
2. Untuk menciptakan efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik *e-procurement* pada LPSE Kota Pekanbaru proses lelang maka perlu didukung oleh pemerintah dengan mempersiapkan sumber daya baik, petugas yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai serta

dukungan sumber pendanaan untuk kelancaran akses layanan LPSE. Dan juga diperlukannya kesiapan infrastruktur dan teknis teknologi yang memadai agar pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan baik. Karena perangkat hukum, kelembagaan dan SDM yang memadai saja tidak akan mampu mewujudkan tujuan *e-procurement* tanpa didukung infrastruktur yang memadai pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammirullah & budiyono. 24. Haris. *Pengantar manajemen*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang, Banyumedia Publishing
- Atmosoeperto, Kisdarto, 2002. *Menuju SDM Berdaya Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Badrudin, 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta: Bandung.
- Chaffey, 2009. *E-Business and E-commerce Management*. Prentice hall united kingdom issued.
- Danim, Sudaewan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, Irra. Chrisyanti. 2013. *Teori Kepemimpinan Managerial (Managership)*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Davila, A. Gupta, M., Palmer, R.J. 2003. *Moving procurement systems to the internet : The adoptions and use of e-procurement technology models*. Standford GSB Research paper No.1742
- Farouk dan Djaali. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. PTIK Press & Restu Agung : Jakarta.
- Handoko, Hanil. T. 2000. *Manajemen personalia Dan Sumber Daya Manusia*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE
- Mahmudi. 2005. *Manajemen kinerja sector publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor publik* . Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- Mangkuprawira, Sjafril. Tb. 2008. *Horizon Bisnis, Manajemen, & SDM*. Bogor: IPB Press
- Nurkolis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah Teori Model Dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo
- Pasolong, Harbani .2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Riduwan. 2012. *Belajar Mudah Penelitian*. Alfabeta : Bandung.
- Sadad, Abdul. 2014. *Organisasi dan Manajemen (Pengaruh pemotivasi Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai)*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek hukum pengadaan barang & jasa dan berbagai permasalahannya*. Ed. 2. Jakarta , Sinar Grafika
- Siagian, Sondang. P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Subkhi, Akhmad dan Jauhar, Mohammad. 2013. *Pengantar Teori & Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Syamsi, Ibnu. 2004. *Efisiensi, Sistem, Dan Prosedur Kerja*. Edisi Revisi. Jakarta Bumi Aksara

Tika, P.2008. *Budaya organisasi dan peningkatan Kinerja Perusahaan* . Jakarta : Bumi Aksara

Turban, E. 2004. *Electronic commerce 2004: A managerial perspektif, New Jersey : Pearson Prentice Hall*

Ulum, Ihyaul, 2012. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Ed 1, Cet 2, Jakarta, Bumi Aksara

Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi Dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal :

Edy Mulyono, Martoyo, Endang Indri Listiani, 2013. *Implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010(studi pada dinas pekerjaan umum kota Pontianak)*. Jurnal tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013

Internet

<http://lpse.pekanbaru.go.id>

<http://en.wikipedia.org/wiki/E-procurement>

<http://www.investor.co.id>

<http://www.bpkp.go.id>

www.lpse.namakldi.go.id

<http://sirup.lkpp.go.id>

Dokumen-Dokumen :

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik (E-Procurement) dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa